



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NARTI HARTATI
2. Jabatan : PANITERA MUDA PIDANA
3. NHK : 471309

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.140.000.000

1. Tanah Seluas 160 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 895 m2/330 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 77 m2/77 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 39.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.750.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
4. MOBIL, TOYOTA COROLLA SEDAN Tahun 1986, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
5. LAINNYA, 4 POLYGON SEPEDA ONTHEL Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 3.250.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 55.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 31.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.265.500.000

III. HUTANG

Rp. 25.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.240.500.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.